WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/Kep.416 -Huk/VII/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.2/KEP.77-HUK/I/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 dan dengan adanya usulan tambahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah dari Perangkat Daerah, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/Kep.77-Huk/I/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, perlu diubah untuk kedua kali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/Kep.77-Huk/I/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 100.3/BA.209/SETDA.Huk tanggal 27 Mei 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/Kep.77-Huk/I/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 100.3.2/Kep.77-Huk/I/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yakni mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2025

WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :
1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :100.3.2/Kep. 416 -Huk/VII/2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 100.3.2/KEP.77-HUK/I/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
1	Badan Pendapatan Daerah	1) Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok Ketetapan Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan; 2) Tata Cara Pemberian, Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) Tata Cara Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; 4) Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 5) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6) Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Secara elektronik; 7) Pengelolaan Pajak Daerah secara *Online*; 8) Pengawasan terhadap Kegiatan Transaksi Usaha Wajib Pajak; 9) Road Map Pengembangan Digitalisasi Sistem Pajak Daerah; 10) Pelaksanaan Opsen; 11) Kode Etik; 12) Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2) Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan; 3) Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Tata cara Penanganan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Ketahanan Keluarga; 2) Pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia.
6	Badan Perencanaan, Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026; 2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2025; 3) Strategi Sanitasi Kota, Kota Bekasi; 4) Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit di Kota Bekasi; 5) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026; 6) Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029; 7) Perubahan Rencana Srategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026; 8) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 3) Analisis Standar Belanja Fisik; 4) Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana; 5) Kebijakan Akuntansi; 6) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi; 7) Kebijakan Pendukung Laporan Keuangan; 8) Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Diatas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Bekasi; 9) Tata Cara Pelaksanaan Pemanfataan Barang Milik Daerah Kota Bekasi; 10) Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		11) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 12) Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1) Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi; 2) Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Bekasi; 3) Penyelenggaraan Izin Reklame.
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1) Tata Cara Pelayanan Penanganan Anak dari Tindakan Kekerasan Perdagangan dan Eksploitasi; 2) Perlindungan yang Wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Perempuan; 3) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
11	Dinas Kesehatan	1) Retribusi Layanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Bekasi; 2) Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi untuk Jasa Pelayanan Kesehatan; 3) Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; 4) Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan; 5) SILPA pelaksanaan Tata Kelola BLUD RSUD Kelas D; 6) Mekanisme Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit UmumDaerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		7) Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 8) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Usaha Depot Air Minum; 9) Rencana Aksi Penanggulangan Tuberkolosis di Kota Bekasi; 10) Rencana Aksi Daerah *Human Immunodeficiency Virus* di Kota Bekasi; 11) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyakit Menular.
12	Dinas Lingkungan Hidup	1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 2) Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup; 3) Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) Pengurangan Sampah; 5) Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan; 6) Pencabutan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemilihan Mitra Kerja Sama Pengolahan Sampah Untuk Energi LIstrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan; 7) Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Bekasi Tahun 2024-2043.
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1) Perubahan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 57.B Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama; 2) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Bekasi; 3) Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan; 4) Forum Penguatan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat di Kota Bekasi.
14	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1) Manajemen *Corporate University* (Manajemen Strategi Pengembangan SDM); 2) Manajemen Pengetahuan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		3) Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); 4) *Coaching*, Monitoring dan Konseling Aparatur Pemerintah Kota Bekasi; 5) Pedoman Penyelenggaraan Magang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
15	Bagian Organisasi	1) Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 2) Nomenklatur dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 3) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi; 4) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; 5) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 6) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 7) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 8) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya air Kota Bekasi; 9) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; 10) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 11) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi; 12) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 13) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		14) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi; 15) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi; 16) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 17) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi; 18) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi; 19) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi; 20) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi; 21) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi; 22) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi; 23) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi; 24) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 25) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kota Bekasi; 26) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 27) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
		28) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi; 29) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 30) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; 31) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi; 32) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi; 33) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi; 34) Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi; 35) Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
16	Bagian Administrasi Pembangunan	1) Perjalanan Dinas Jabatan; 2) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025; 3) Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025; 4) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026.
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1) Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2) *Interoperabilitas* Data Dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
18	Bagian Tata Pemerintahan	Pedoman Program Penataan Lingkungan Rukun Warga Keren.
19	Bagian Perekonomian	1) Penugasan Kepada PT. Mitra Patriot (Perseroda) dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif Terpadu; 2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah.
20	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Kota Bekasi Tahun 2021-2040.
21	Dinas Tata Ruang	1) Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan di Kota Bekasi; 2) Pemenuhan Kewajiban Ruang Terbuka Hijau terhadap Bangunan Fungsi Usaha yang Melampaui Koefisien Dasar Bangunan dan Kekurangan Area Ruang Terbuka Hijau; 3) Pedoman Pengesahan Persetujuan Rencana Induk (*Masterplan*) dan/atau Rencana Tapak (*Siteplan*); 4) Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.
22	Dinas Pendidikan	1) Tata Cara Pemilihan Dewan Pendidikan di Kota Bekasi; 2) Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kota Bekasi.
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tata Cara Pembentukan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUDUL
24	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	1) Penugasan PT. Mitra Patriot (Perseroda) Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Publik dan Wisata Air di Kawasan Kalimalang; 2) Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi di Kota Bekasi.

WALIKOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO